

**TUGAS AKHIR**

**KAJIAN FASILITAS SOSIAL DI PUSAT PELAYANAN  
PRIMER KABUPATEN BANDUNG**

Oleh :  
**Riyadi Akbar Munajat**  
**123060064**



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS PASUNDAN**  
**BANDUNG**  
**2018**

## ABSTRAK

*Fasilitas sosial merupakan suatu tempat penunjang dan kebutuhan utama yang dibutuhkan dalam kelangsungan hidup sehari-hari di sebuah wilayah tertentu. Pembangunan fasilitas sosial seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan, olahraga dan rekreasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya serta kesatuan dan persatuan bangsa terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi antara kelompok serta masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antar wilayah/kota. Perkembangan suatu wilayah/kota hendaknya diikuti oleh ketersediaan yang lengkap dan dapat melayani kebutuhan masyarakat setempat, sehingga perlu dilihat ketersediaan dan pelayanan fasilitas sosial tersebut. Hal ini sama halnya yang terjadi di pusat primer Kabupaten Bandung yang memerlukan identifikasi mengenai tingkat pelayanan fasilitas sosial dan kinerja fasilitas sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi serta menganalisis tingkat pelayanan fasilitas sosial dan kinerja fasilitas sosial di pusat pelayanan primer Kabupaten Bandung.*

*Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan ini yaitu menggunakan metode analisis campuran yaitu metode analisis kualitatif dan kuantitatif, dimana metode kuantitatif dengan menghitung analisis tingkat pelayanan dan kebutuhan fasilitas sosial berdasarkan kimpraswil (SK Menteri Permukiman dan Prafasilitas No. 534/KPTS/M/2001) dan metode analisis kualitatif dengan melihat analisis hasil persepsi masyarakat (kuesioner).*

*Hasil dari penelitian ini yaitu dapat dilihat fasilitas apa saja yang masih perlu peningkatan pelayanannya, sehingga perlu penambahan dalam upaya peningkatan dan pemerataan fasilitas sosial agar dapat melayani penduduk dan ketersediaan fasilitas sosial yang ada dapat terjangkau oleh penduduk serta melihat kualitas fasilitas tersebut berdasarkan tingkat pelayanan, kelengkapan sarana penunjang dan persepsi masyarakat sehingga diketahui kualitas pelayanan fasilitas sosial di pusat primer Kabupaten Bandung.*

**Kata kunci :** Fasilitas Sosial, Kualitas Pelayanan, Pusat Primer Kabupaten Bandung

## **ABSTRACT**

*Social facilities are a place of support and the main needs in daily survival in a particular region. The development of social facilities such as educational, health, worship, trade, sport and recreation facilities have a very important role in supporting economic, social, cultural activities and the unity and unity of the nation, especially as a basic capital in facilitating interaction and communication between groups and communities and binding and connect between regions / cities. The development of a region / city should be followed by a complete availability and can serve the needs of local communities, so it needs to be seen the availability and service of social facilities. This is similar to what happened in the Bandung District primary center which requires identification of the level of social facilities and social facilities performance.*

*The purpose of this study is to identify and analyze the level of social service facilities and social facilities performance in the primary service center of Bandung Regency.*

*The method used in the preparation of this report is using a mixed analytical method that is qualitative and quantitative analysis method, where the quantitative method by calculating the service level analysis and social facilities needs based on kimpraswil (SK Minister of Settlement and Pre Facility No. 534 / KPTS / M / 2001) and methods of qualitative analysis by looking at the analysis of the results of community perceptions (questionnaire).*

*The result of this research is to see what facilities still need to improve the service, so that need to increase in effort of increasing and equity of social facility so that can serve the population and availability of social facilities available to be able to reach by the people and see the quality of facility based on service level, completeness means of support and public perception so that it is known the quality of social service facilities in the primary center of Bandung regency.*

**Keywords** : *Social Facilities, Service Quality, Primary Center of Bandung Regency*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan suatu wilayah/kota berdampak pada perubahan sosial, ekonomi, geografi, lingkungan dan budaya sehingga diperlukan fasilitas penunjang untuk melayani kebutuhan tersebut dan mendukung laju pertumbuhan di berbagai sektor. Indikator peningkatan pembangunan suatu wilayah/kota terlihat dari sistem fasilitas. Sistem fasilitas yang sistematis dan terpadu menjadi bagian struktur ruang yang berfungsi sebagai jaringan penghubung dan roda kegiatan dalam penataan ruang. Kemampuan fasilitas sosial melayani penduduk terlihat dari segi kuantitas dan kualitas dengan parameter ketersediaan fasilitas, kondisi bangunan, jarak wilayah serta pelayanan yang diberikan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah/kota.

Fasilitas sosial merupakan suatu tempat penunjang dan kebutuhan utama yang dibutuhkan dalam kelangsungan hidup sehari-hari di sebuah wilayah tertentu. Pembangunan fasilitas sosial seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, juga perdagangan dan olahraga/rekreasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya serta kesatuan dan persatuan bangsa terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi antara kelompok serta masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antar wilayah/kota.

Perkembangan suatu wilayah/kota hendaknya diikuti oleh ketersediaan yang lengkap dan dapat melayani kebutuhan masyarakat setempat, sehingga perlu dilihat ketersediaan dan pelayanan fasilitas sosial tersebut. Dalam perkembangan suatu wilayah/kota, fasilitas memang memiliki peran penting yang dapat menunjukkan apakah suatu wilayah/kota tersebut dapat dikatakan baik atau buruk dilihat dari ketersediaan fasilitasnya yang lengkap sehingga dengan demikian secara berkesinambungan pemerintah berusaha meningkatkan kuantitas fasilitas yang ada, hal ini juga disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya yang ada

pada wilayah/kota tersebut, sehingga ketersediaan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah dapat dirasakan pelayanannya oleh masyarakat.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban menyediakan fasilitas sosial untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk sebagai tujuan pembangunan wilayah/kota. Kebijakan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah berdampak kepada diberikannya kewenangan setiap daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan. Implementasi dari kebijakan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengembangkan potensi daerah dengan menyediakan fasilitas wilayah/kota.

Perkembangan yang cukup pesat di wilayah Kota Bandung saat ini telah mengimbas ke wilayah sekitarnya yaitu wilayah Kabupaten Bandung. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada intinya kegiatan kota dan perkembangannya tidak dapat dibatasi oleh batas administratif saja pengaruh pelayanan dari pusat-pusat kegiatan dapat mencapai wilayah lain selama tingkat aksesibilitasnya memungkinkan. Wilayah Kabupaten Bandung yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung dan dihubungkan dengan tingkat aksesibilitas yang tinggi mengakibatkan kedua wilayah tersebut secara fungsional memiliki hubungan yang sangat kuat. Namun demikian hubungan yang kuat tersebut diwujudkan dalam arti Soreang diarahkan menjadi suatu kota mandiri yang mendukung Kota Bandung. Dalam konteks sebagai kota mandiri sebagai ibukota Kabupaten Bandung, Soreang harus memiliki aktivitas dan infrastruktur yang mampu melayani penduduk kotanya sendiri dan kota-kota lain yang ada dalam wilayah pelayanannya. Dengan demikian Kabupaten Bandung memiliki fungsi dan peran sebagai pusat pelayanan terhadap seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Bandung yaitu dengan Soreang sebagai pusat primernya. Untuk memberi peran yang optimal sebagai pusat primer dan sebagai pusat pelayanan maka perlu untuk mengkaji jenis dan jumlah fasilitas sosial yang dibutuhkan berdasarkan fungsi primer kabupaten/kota dan kebutuhan penduduk di dalamnya dan Soreang sebagai pusat primer agar lebih maksimal pelayanannya.

Penciptaan fungsi-fungsi baru di kawasan yang potensial untuk dikembangkan di sekitar Kabupaten Bandung, yaitu pada pusat-pusat wilayah pengembangan yang akan dikembangkan. Soreang sebagai pusat utama Kabupaten Bandung yang didukung oleh kota hierarki yang lebih kecil. Strategi pengembangan Kota Soreang sebagai ibukota dilakukan dengan cara peningkatan aksesibilitas dan atau interkoneksi dengan wilayah lain dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai dengan skala kabupaten. Pusat-pusat ini harus didukung dengan ketersediaan fasilitas perkotaan yang memadai, untuk mengalihkan pemusatan pergerakan ke kota inti.

Pengembangan pusat primer Kabupaten Bandung berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung disebutkan bahwa pengembangan pusat primer untuk Kabupaten Bandung terdapat di Soreang. Bentuk wilayah Kabupaten Bandung yang mengelilingi Kota Bandung, kekompakan pengembangannya sulit diwujudkan, hal ini menyulitkan pemerataan pelayanan. Dengan adanya pusat primer dan dukungan pengembangan jaringan jalan yang akan menghubungkan wilayah-wilayah di Kabupaten Bandung menuju pusat ini, maka akan membantu pusat ini untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, sehingga ketergantungan Kabupaten Bandung terhadap kota inti dapat dikurangi dan membagi wilayah kabupaten menjadi 6 (enam) wilayah pengembangan (Soreang, Banjaran, Majalaya, Cileunyi-Rancaekek dan Cicalengka) wilayah pengembangan yang dilayani oleh pusat primer Soreang serta dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung no 3 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung tahun 2007 sampai tahun 2027 pada Bagian Kelima Insentif dan Disinsentif pada Pasal 123 yaitu:

- 1) Insentif khusus diberikan untuk pengembangan **pusat primer/hirarkhi IIA Soreang -Kutawaringin - Katapang**, pengembangan kawasan strategis Kota Baru Tegalluar, Kawasan Terpadu Olah Raga Si Jalak Harupat dan Kawasan Industri Margaasih.
- 2) Insentif untuk mendorong pengembangan hirarkhi IIA meliputi:
  - a. Pembangunan Jalan Tol Pasirkoja – Soreang atau jalan akses tol pasirkoja;
  - b. Pembangunan sarana pemerintahan, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum dan sosial lainnya ;

Pengembangan fasilitas akan mengacu kepada penjenjangan pelayanan serta besarnya jumlah penduduk yang dilayani. Untuk itu dapat didekati dengan kecenderungan pertumbuhan penduduk yang dilayani, Dalam hal ini pelayanan setiap fasilitas diperhitungkan dari tingkat pelayanan kuantitas fasilitas serta kapasitas rata-rata saat ini. Pengembangan fasilitas di Kabupaten Bandung yaitu pengembangan fasilitas pendidikan meliputi; pembangunan sarana pendidikan dengan diikuti oleh peningkatan kuantitas fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan. Pengembangan untuk fasilitas kesehatan meliputi; pembangunan fasilitas kesehatan. Fasilitas peribadatan yaitu dengan melalui peningkatan kuantitas fasilitas peribadatan. Untuk pengembangan perdagangan meliputi; pengembangan fasilitas perdagangan dengan skala pelayanan regional di kecamatan-kecamatan sebagai pusat pengembangan dan pengembangan fasilitas perdagangan dengan skala lokal dan lingkungan. Dan yang terakhir pengembangan fasilitas olahraga dan rekreasi meliputi; peningkatan kuantitas fasilitas (RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027).

Pusat Primer Kabupaten Bandung yang berada di Soreang dengan Hierarki Fungsi sebagai PKL dengan Kawasan Perkotaan Soreang-Kutawaringin-Katapang untuk melayani kegiatan skala beberapa kabupaten/kota. Secara lebih jelas yang dikaji adalah:

- a. Pendidikan : Perguruan Tinggi
- b. Kesehatan : Rumah Sakit Tipe B
- c. Peribadatan : Masjid Agung
- d. Perdagangan : Pasar Tradisional, Mall dan Pasar Induk
- e. Olahraga/Rekreasi : Stadion dan Taman Kota

Terkait dengan hal itu kajian penelitian yang dilakukan fasilitas primer yang meliputi skala pelayanan wilayah untuk dapat memberi penegasan fungsi sebagai Pusat Primer dalam bentuk penulisan dengan judul ***“Kajian Fasilitas Sosial di Pusat Pelayanan Primer Kabupaten Bandung”***.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Ketersediaan fasilitas sosial yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan,

perdagangan, peribadatan dan olahraga/rekreasi di pusat pelayanan primer Kabupaten Bandung menjadi faktor penting, seiring dengan perkembangan jumlah penduduk pada setiap tahunnya, jumlah penduduk yang semakin bertambah setiap tahunnya harus diimbangi oleh penambahan jumlah fasilitas, agar dapat memenuhi kebutuhan penduduk terhadap fasilitas. Kajian fasilitas sosial di pusat pelayanan primer Kabupaten Bandung diperlukan untuk mengetahui kuantitas dan kualitas tingkat pelayanan yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan skala wilayah/kota.

Dari latar belakang tersebut, dapat diketahui bahwa didalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung disebutkan bahwa pengembangan pusat primer untuk Kabupaten Bandung yang terdapat di Soreang. Dengan adanya pusat primer dan dukungan pengembangan jaringan jalan yang akan menghubungkan wilayah-wilayah di Kabupaten Bandung menuju pusat ini, maka akan membantu pusat ini untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, sehingga ketergantungan Kabupaten Bandung terhadap kota inti dapat dikurangi dan membagi wilayah kabupaten menjadi 6 (enam) wilayah pengembangan (Soreang, Banjaran, Majalaya, Cileunyi-Rancaekek dan Cicalengka) dan dilayani oleh pusat primer Soreang.

Pusat primer Kabupaten Bandung yang berada di Soreang sebagai ibukota Kabupaten Bandung harus dapat melayani seluruh masyarakat di wilayahnya. Apakah Soreang sudah mampu melayani kebutuhan fasilitas sosial dalam skala wilayah/kota dikarenakan yang terjadi keterjangkauan yang cukup jauh antara Soreang dengan wilayah lain yang ada di Kabupaten Bandung. Oleh karena itu perlu ditingkatkan pelayanan fasilitas sosial di pusat pelayanan primer Kabupaten Bandung. Sehingga diperlukan kajian fasilitas sosial di pusat pelayanan primer Kabupaten Bandung. Maka dari itu dilakukannya penelitian dengan pertanyaan penelitian yaitu:

- *Bagaimana tingkat pelayanan fasilitas sosial di pusat pelayanan primer Kabupaten Bandung?*
- *Bagaimana kebutuhan fasilitas sosial di pusat pelayanan primer Kabupaten Bandung?*



- *Apakah penduduk Kabupaten Bandung sudah merasa terlayani dengan pelayanan fasilitas sosial di pusat pelayanan primer Kabupaten Bandung?*
- *Bagaimana kualitas fasilitas sosial di pusat pelayanan primer Kabupaten Bandung berdasarkan persepsi masyarakat?*

### **1.3 Tujuan dan Sasaran**

#### **1.3.1 Tujuan**

Dengan melihat rumusan permasalahan dan latar belakang studi, maka tujuan studi yang hendak dicapai adalah mengidentifikasi kualitas dan tingkat pelayanan fasilitas sosial di pusat pelayanan primer Kabupaten Bandung.

#### **1.3.2 Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai adalah

1. Teridentifikasi dan teranalisisnya ketersediaan eksisting fasilitas sosial dan tingkat pelayanan fasilitas sosial di pusat pelayanan primer Kabupaten Bandung.
2. Teridentifikasi kualitas pelayanan fasilitas sosial di pusat primer Kabupaten Bandung.

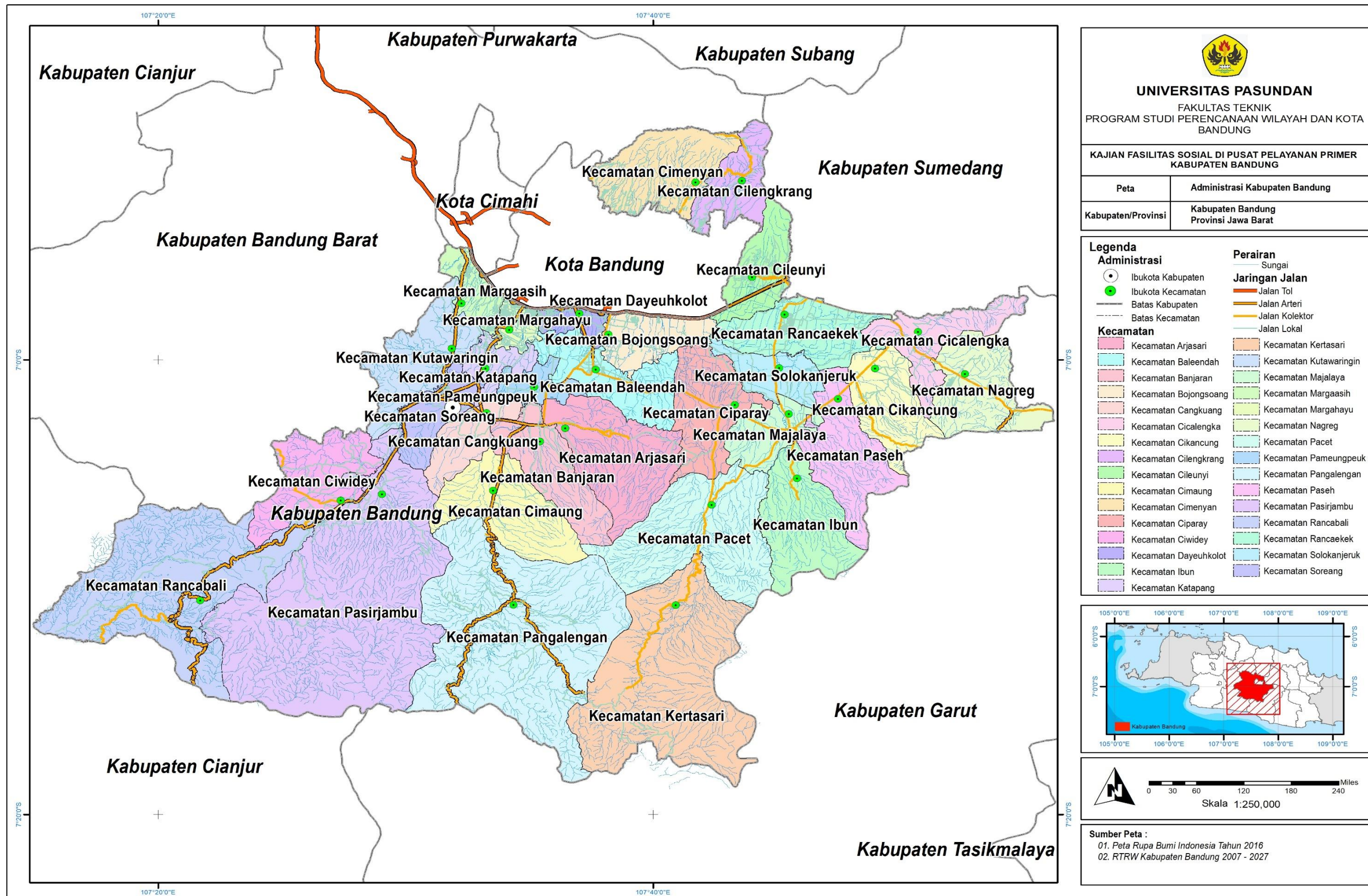
### **1.4 Ruang Lingkup**

#### **1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah**

Secara geografis Kabupaten Bandung terletak pada 107° 22' – 108° 50' Bujur Timur dan 6° 41' – 7° 19' Lintang Selatan. Adapun secara administratif, Kabupaten Bandung merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat dengan wilayah administratif Kabupaten Bandung meliputi 31 Kecamatan, 270 desa dan 10 kelurahan dengan total area seluas 1762,40 Km<sup>2</sup>, dengan batas wilayah secara administrasi adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kab.Bandung Barat, Kota Bandung dan Kab.Sumedang
- Sebelah Selatan : Kab. Garut dan Kabupaten Cianjur
- Sebelah Barat : Kab.Bandung Barat, dan Kab.Cianjur
- Sebelah Timur : Kab. Sumedang dan Kabupaten Garut
- Bagian Tengah : Kota Bandung dan Kota Cimahi.

Gambar I.1  
Peta Administrasi Kabupaten Bandung



## **1.4.2 Ruang Lingkup Materi**

Terdapat ruang lingkup materi pada studi ini adalah sebagai berikut:

1. Teridentifikasi jumlah dan sebaran fasilitas sosial di pusat primer Kabupaten Bandung dengan skala wilayah yang sudah terdapat di wilayah kajian yaitu fasilitas sosial di pusat pelayanan primer Kabupaten Bandung, fasilitas yang dikaji meliputi:

- Pendidikan : Perguruan Tinggi
- Kesehatan : Rumah Sakit Tipe B
- Peribadatan : Masjid Agung
- Perdagangan : Pasar Tradisional, Mall dan Pasar Induk
- Olahraga/Rekreasi : Stadion dan Taman Kota

Keluaran yang dihasilkan yaitu pelayanan dari fasilitas sosial di pusat pelayanan primer Kabupaten Bandung yang diukur dari tingkat pelayanan serta kebutuhan fasilitas di masa yang akan datang di pusat pelayanan primer Kabupaten Bandung.

2. Menganalisis kualitas pelayanan fasilitas sosial di pusat primer Kabupaten Bandung dalam skala wilayah yang sudah terdapat di wilayah kajian yaitu pusat primer Kabupaten Bandung yang ada di Soreang yang diukur dari tingkat pelayanan, kelengkapan fasilitas serta kepuasan masyarakat.

## **1.5 Metodologi Penelitian**

### **1.5.1 Metodologi Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif eksploratif yaitu metode yang memberikan gambaran, penjelasan yang disertai dengan penggalan secara luas tentang pengertian atau makna keadaan atau kondisi obyek tertentu.

Objek yang dikaji meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan, olahraga dan rekreasi. Keluaran yang dihasilkan yaitu kualitas pelayanan dan kebutuhan dari fasilitas sosial di pusat pelayanan primer Kabupaten Bandung.

### 1.5.2 Metodologi Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan dibagi ke dalam 2 (dua) kegiatan, adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengumpulan Data Primer

Survei primer yaitu pemerolehan data yang didapat langsung dari hasil survei lapangan dengan cara mengamati objek yang menjadi sasaran penelitian. Pengambilan data primer (lapangan) dilakukan dengan melalui:

- Observasi lapangan, dimana peneliti langsung melakukan pengamatan di lapangan dengan melihat kondisi yang ada.
- Dokumentasi, yang dilakukan untuk mendapatkan kondisi eksisting secara visual.
- Kuesioner atau wawancara, dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung kepada narasumber/sumber data yang dianggap dapat mewakili kelompoknya. Penyebaran kuesioner diambil beberapa sampel dalam penyebaran kuesioner ini dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel berdasarkan tabel Isaac-Michael. Dari tabel Isaac-Michael tersebut dapat dijelaskan bahwa jika dilihat dari N (jumlah populasi) di Kabupaten Bandung yang berjumlah 3.596.623 jiwa dengan berdasarkan derajat kesalahan 10% maka sampel yang diambil yaitu 271 responden.

#### 2. Pengumpulan Data Sekunder

Survei Sekunder adalah melakukan pengumpulan referensi yang berhubungan dengan topik studi, diperoleh dari buku-buku serta hasil penelitian-penelitian sebagai landasan teori dan bahan perbandingan, serta data-data yang diperoleh dari Dinas/Instansi pemerintahan terkait.

### 1.5.3 Metodologi Analisis

Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian “Kajian Fasilitas Sosial di Pusat Pelayanan Primer Kabupaten Bandung” adalah menggunakan metode pendekatan analisis campuran (kuantitatif dan kualitatif), dimana variabel yang akan dikaji pada penelitian ini merupakan fasilitas yang sudah ada di pusat primer

Kabupaten Bandung meliputi fasilitas pendidikan berupa perguruan tinggi, fasilitas kesehatan berupa rumah sakit, fasilitas peribadatan berupa masjid agung, fasilitas perdagangan berupa pasar tradisional, mall dan pasar induk, fasilitas olahraga berupa stadion dan fasilitas rekreasi berupa taman kota. Variabel tersebut akan dianalisis dengan menggunakan berupa proyeksi kebutuhan fasilitas, tingkat pelayanan, persepsi masyarakat, kelengkapan sarana penunjang fasilitas sosial yang dinilai untuk mengetahui kualitas pelayanan fasilitas sosial di pusat primer Kabupaten Bandung.

### **1. Proyeksi Penduduk**

Metode yang dipilih untuk analisis proyeksi penduduk di pusat pelayanan primer Kabupaten Bandung yaitu menggunakan metode *Regresi Linier* karena memiliki nilai  $r^2$  (r square) yang paling mendekati 1 dan nilai standar deviasi yang paling kecil yang dibandingkan dengan metode regresi logaritma dan aritmetika.

### **2. Analisis Kualitas Pelayanan Fasilitas Sosial**

Analisis kualitas sarana menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan melihat indikator-indikator yang digunakan. Indikator yang dilihat yaitu:

Dalam analisis penentuan jumlah dan fasilitas ini, mengacu pada standar yang ada yaitu berpedoman pada standar yang dikeluarkan dari kimpraswil (SK Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001) dengan didasarkan pada jumlah penduduk pendukung. Adapun perhitungan yang digunakan adalah:

#### **a. Kebutuhan**

$$\text{Kebutuhan (Jumlah Yang Seharusnya)} = \frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Standar Penduduk Pendukung}}$$

#### **b. Tingkat Pelayanan**

$$\text{Tingkat Pelayanan} = \frac{\text{Jumlah Yang Ada}}{\text{Jumlah Yang Seharusnya}} \times 100\%$$

**Tabel I.1**  
**Standar Pelayanan dalam Penyediaan Sarana di Pusat Primer**

Fasilitas	Jenis Fasilitas	Standar Pelayanan (jiwa)
Pendidikan	Perguruan Tinggi	70.000
Kesehatan	Rumah Sakit	240.000
Peribadatan	Masjid Agung	1.000.000
Perdagangan	Pasar Induk	480.000
	Mall	480.000
	Pasar Tradisional	120.000
Olahraga/Rekreasi	Stadion	1.000.000
	Taman Kota	480.000

*Sumber: Peraturan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 543/KPTS/M/2001*

### c. Kelengkapan Sarana Penunjang

Analisis kelengkapan fasilitas pendukung dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Metode ini dilakukan dengan membandingkan antara kelengkapan fasilitas pendukung yang sesuai dengan standar untuk mengetahui fasilitas yang disediakan. Adapun standar yang digunakan yaitu:

**Tabel I.2**  
**Peraturan Mengenai Kelengkapan Sarana Penunjang untuk Pusat Primer**

Fasilitas	Jenis Fasilitas	Sumber
Fasilitas Pendidikan	Perguruan Tinggi	Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI tentang standar nasional pendidikan tinggi No. 49 Tahun 2014
Fasilitas Kesehatan	Rumah Sakit Tipe B	Permenkes No. 340/MENKES/PER/III/2010 tentang klasifikasi rumah sakit
Fasilitas Peribadatan	Masjid Agung	Keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam No. 84 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis penilaian dan penetapan masjid agung percontohan tingkat nasional
Fasilitas Perdagangan	Pasar Induk	Perda Kab. Bandung No 20 Tahun 2009 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar
	Pasar Tradisional	
	Mall	
Fasilitas Olahraga/Rekreasi	Stadion	SNI No. 03-3647-1994 tentang tata cara perencanaan teknik bangunan gedung olahraga
	Taman Kota	Permen Pu no 5 tahun 2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan

*Sumber : Hasil Olahan Tahun 2018*

### d. Persepsi Masyarakat

Analisis persepsi masyarakat yaitu dengan cara penyebaran kuesioner kepada masyarakat di pusat pelayanan primer Kabupaten Bandung. Penyebaran kuesioner ini dilakukan untuk mengetahui lebih jelas tentang pelayanan fasilitas sosial terhadap masyarakat, apa persepsi masyarakat mengenai fasilitas sosial yang telah disediakan dengan melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap fasilitas sosial.

Kajian kualitas fasilitas sosial di pusat pelayanan primer Kabupaten Bandung dilakukan dengan membandingkan antara:

- Ketersediaan eksisting (jumlah fasilitas yang ada) dengan melihat tingkat pelayanan pada setiap fasilitas sosial.
- Standar pelayanan minimum yaitu, standar mengenai petunjuk perencanaan kawasan perumahan kota dan berpedoman pada standar yang dikeluarkan dari kimpraswil (SK Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001).
- Mengukur kualitas menurut masyarakat yang dihasilkan dari kuesioner untuk mengetahui masyarakat bisa memberikan respon dengan adanya kualitas dan tingkat pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah, sehingga akan diperoleh frekuensi kecenderungan masyarakat mengenai kualitas pelayanan fasilitas sosial tersebut.

Sehingga dapat dikaji apakah fasilitas sosial yang sudah disediakan oleh pemerintah sudah dapat melayani masyarakat di Kabupaten Bandung, apa sebaliknya yaitu dengan melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan fasilitas sosial tersebut.

Tingkat kepuasan yang dihasilkan dari persepsi masyarakat ini termasuk kedalam kinerja kualitas pelayanan dimana digunakan dengan menggunakan tolok ukur menurut Suryokusumo 2008 (dalam Tytoer R.A, 2014:4) yaitu ketersediaan (tangible) yang dilihat dari ketersediaan sarana tersebut, kemampuan (reability) yang dilihat dari kelengkapan fasilitas penunjang secara umum, serta kelayakan (eligibility) yang dilihat dari kondisi, kebersihan serta pelayanan yang diberikan. Tingkat kepuasan tersebut menggunakan analisis kualitatif dimana data yang didapat dari hasil kuisisioner yang dilakukan kepada masyarakat. Adapun kriteria yang digunakan yaitu:

**Tabel I.3**  
**Variabel Persepsi Masyarakat**

Fasilitas	Keterangan
Fasilitas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat dapat dikatakan puas jika ketersediaannya baik, kelengkapan fasilitas secara umum lengkap seperti memiliki ruang kelas, perpustakaan, ruang pimpinan dan dosen serta fasilitas jaringan prasarana seperti air, listrik dan jaringan komunikasi, kondisi dan kebersihan baik, dan pelayanan</li> </ul>

Fasilitas	Keterangan
	<p>yang diberikan memuaskan baik dari pelayanan dari tenaga pengajar, serta staff dan lainnya (cepat, sopan, dan ramah).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat dapat dikatakan cukup jika ketersediaan cukup, sarana kurang cukup, kelengkapan fasilitas secara umum kurang lengkap seperti ruang kelas, perpustakaan, ruang pimpinan dan dosen serta fasilitas jaringan prasarana seperti air, listrik dan jaringan komunikasi, kondisi dan kebersihan kurang maupun pelayanan yang diberikan kurang baik.</li> <li>• Masyarakat dapat dikatakan tidak puas jika ketersediaannya tidak cukup, tetapi kelengkapan fasilitas secara umum tidak lengkap, kondisi yang buruk dan kebersihan yang kotor maupun pelayanan yang diberikan tidak baik.</li> </ul>
Fasilitas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat dapat dikatakan puas jika ketersediaannya fasilitas baik, kelengkapan fasilitas secara umum lengkap seperti pelayanan ruang inap, pelayanan medik, pelayanan unit gawat darurat, pelayanan medik spesialis serta pelayanan penunjang, kondisi dan kebersihan fasilitas baik, dan pelayanan yang diberikan memuaskan baik dari pelayanan dari tenaga kesehatan serta staff dan pelayanan lainnya.</li> <li>• Masyarakat dapat dikatakan cukup jika ketersediaan fasilitas cukup, sarana kurang cukup, kelengkapan fasilitas secara umum kurang lengkap seperti seperti pelayanan ruang inap, pelayanan medik, pelayanan unit gawat darurat, pelayanan medik spesialis serta pelayanan penunjang, kondisi dan kebersihan kurang bersih maupun pelayanan yang diberikan kurang baik seperti dari pelayanan dari tenaga kesehatan serta staff dan pelayanan lainnya.</li> <li>• Masyarakat dapat dikatakan tidak puas jika ketersediaannya fasilitas tidak cukup, tetapi kelengkapan fasilitas secara umum tidak lengkap, kondisi yang buruk dan kebersihan yang kotor maupun pelayanan yang diberikan tidak baik.</li> </ul>
Fasilitas Peribadatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat dapat dikatakan puas jika ketersediaannya fasilitas baik, kelengkapan fasilitas secara umum lengkap seperti tempat wudhu/kamar mandi, sound system, kantor secretariat, AC, perlengkapan pengurusan jenazah, gudang, taman dan lahan parkir, kondisi dan kebersihan fasilitas peribadatan baik, dan pelayanan yang diberikan memuaskan seperti staff dan sekretariat pelayanan fasilitas peribadatan.</li> <li>• Masyarakat dapat dikatakan cukup jika ketersediaan cukup, sarana kurang cukup, kelengkapan fasilitas secara umum kurang lengkap seperti tempat wudhu/kamar mandi, sound system, kantor secretariat, AC, perlengkapan pengurusan jenazah, gudang, taman dan lahan parkir, kondisi dan kebersihan kurang maupun pelayanan yang diberikan kurang baik.</li> <li>• Masyarakat dapat dikatakan tidak puas jika ketersediaannya fasilitas tidak cukup, tetapi kelengkapan fasilitas secara umum tidak lengkap seperti tempat wudhu/kamar mandi, sound system, kantor secretariat, AC, perlengkapan pengurusan jenazah, gudang, taman dan lahan parkir, kondisi yang buruk dan kebersihan yang kotor maupun pelayanan yang diberikan tidak baik.</li> </ul>
Fasilitas Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat dapat dikatakan puas jika ketersediaannya fasilitas baik, kelengkapan fasilitas secara</li> </ul>



Fasilitas	Keterangan
	<p>umum lengkap seperti kantor pengelola, lahan parker, sarana pengamanan, menyediakan bongkar muat barang yang memadai, ketersediaan sarana pemadam kebakaran, sistem persampahan, dan sarana penunjang lainnya, kondisi dan kebersihan baik, dan pelayanan yang diberikan memuaskan seperti kelengkapan penjual pedagang serta aman, nyaman dan bersih.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat dapat dikatakan cukup jika ketersediaan cukup, sarana kurang cukup, kelengkapan fasilitas secara umum kurang lengkap, seperti kantor pengelola, lahan parker, sarana pengamanan, menyediakan bongkar muat barang yang memadai, ketersediaan sarana pemadam kebakaran, sistem persampahan, dan sarana penunjang lainnya, kondisi dan kebersihan kurang maupun pelayanan yang diberikan kurang baik.</li> <li>• Masyarakat dapat dikatakan tidak puas jika ketersediaannya tidak cukup, tetapi kelengkapan fasilitas secara umum tidak lengkap seperti kantor pengelola, lahan parker, sarana pengamanan, menyediakan bongkar muat barang yang memadai, ketersediaan sarana pemadam kebakaran, sistem persampahan, dan sarana penunjang lainnya, kondisi yang buruk dan kebersihan yang kotor maupun pelayanan yang diberikan tidak baik seperti penjual pedagang tidak lengkap.</li> </ul>
Fasilitas Olahraga/Rekreasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat dapat dikatakan puas jika ketersediaannya baik, kelengkapan fasilitas secara umum lengkap seperti kantor pengelola, lokasi ruang p3k, ruang ganti untuk pemain, pelatih dan wasit, memiliki kursi penonton minimal 1.000-3.000 jiwa, kantin, lahan parkir, ruang vip, pers, ruang mesin dan jalur sirkulasi dam memiliki luas minimal RTH 144.000 m<sup>2</sup>, trek lari lebar 7m dan panjang 400m, WC umum, panggung terbuka, area bermain dan prasarana tertentu seperti kolam retensi, kondisi dan kebersihan baik.</li> <li>• Masyarakat dapat dikatakan cukup jika ketersediaan cukup, sarana kurang cukup, kelengkapan fasilitas secara umum kurang lengkap seperti kantor pengelola, lokasi ruang p3k, ruang ganti untuk pemain, pelatih dan wasit, memiliki kursi penonton minimal 1.000-3.000 jiwa, kantin, lahan parkir, ruang vip, pers, ruang mesin dan jalur sirkulasi dam memiliki luas minimal RTH 144.000 m<sup>2</sup>, trek lari lebar 7m dan panjang 400m, WC umum, panggung terbuka, area bermain dan prasarana tertentu seperti kolam retensi, kondisi dan kebersihan kurang baik.</li> <li>• Masyarakat dapat dikatakan tidak puas jika ketersediaannya tidak cukup, tetapi kelengkapan fasilitas secara umum tidak lengkap seperti kantor pengelola, lokasi ruang p3k, ruang ganti untuk pemain, pelatih dan wasit, memiliki kursi penonton minimal 1.000-3.000 jiwa, kantin, lahan parkir, ruang vip, pers, ruang mesin dan jalur sirkulasi dam memiliki luas minimal RTH 144.000 m<sup>2</sup>, trek lari lebar 7m dan panjang 400m, WC umum, panggung terbuka, area bermain dan prasarana tertentu seperti kolam retensi,, kondisi yang buruk dan kebersihan yang kotor.</li> </ul>

Sumber : Hasil Olahan Tahun 2018

### 3. Faktor Variabel

Dalam menganalisis data maka diperlukan penentuan faktor variabel agar dapat dikelompokkan variabel apa saja yang perlu dikaji dan dianalisis dalam laporan ini, yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel I.4**  
**Variabel Penelitian**

Variabel	Indikator	Parameter	Sumber
• Fasilitas Pendidikan	Kebutuhan Fasilitas	Standar pelayanan dan jumlah penduduk	Peraturan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 543/KPTS/M/2001 dan Teori
• Fasilitas Kesehatan	Tingkat Pelayanan	Jumlah sarana yang tersedia dan jumlah sarana yang dibutuhkan	
• Fasilitas Perdagangan	Tingkat Kepuasan/Persepsi Masyarakat	Ketersediaan sarana, kondisi bangunan, jarak tempuh serta pelayanan yang diberikan	
• Fasilitas Peribadatan	Kelengkapan Sarana	Standar fasilitas dan kondisi eksisting	
• Fasilitas Olahraga/Rekreasi			

*Sumber : Hasil Olahan Tahun 2018*

### 1.6 Batasan Studi

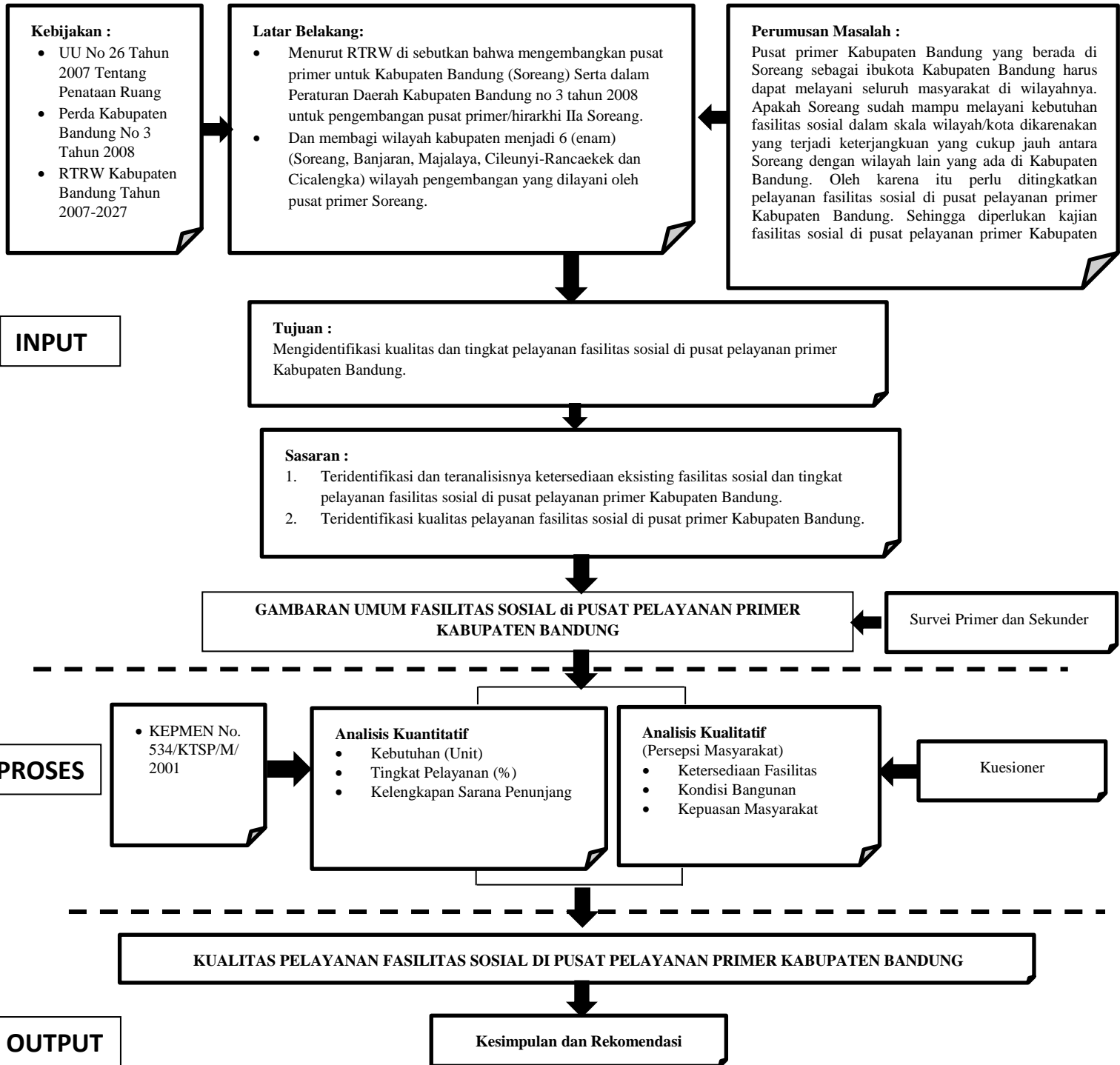
Jika dilihat dari permasalahan fasilitas sosial di pusat primer Kabupaten Bandung maka cukup luas dan cukup banyak lingkungannya jika diteliti secara menyeluruh dan mendetail. Dalam penelitian Tugas Akhir ini, dengan melihat tujuan dari penulisan ini adalah mengidentifikasi kualitas dan tingkat pelayanan fasilitas sosial di pusat pelayanan primer Kabupaten Bandung, sehingga analisis yang dikaji yaitu kebutuhan fasilitas untuk masa yang akan datang dan melihat kualitas dari tingkat pelayanan berdasarkan kondisi fasilitas sosial di pusat primer Kabupaten Bandung.

Adapun pembagian jenis fasilitas sosial yaitu dengan melihat fungsi kegiatan di pusat primer Kabupaten Bandung, sehingga fasilitas sosial yang menjadi kajiannya pun fasilitas primer yang pelayanannya dengan skala wilayah yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan olahraga/rekreasi. Untuk jenis-jenis fasilitas sosial ditentukan berdasarkan kimpraswil (SK Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001), sehingga dibatasi menjadi:

- Fasilitas Pendidikan : Perguruan Tinggi
- Fasilitas Kesehatan : Rumah Sakit
- Fasilitas Peribadatan : Masjid Agung

- Fasilitas Perdagangan : Pasar Tradisional, Mall dan Pasar Induk
- Fasilitas Olahraga/Rekreasi : Stadion dan Taman Kota

### 1.7 Kerangka Pemikiran



## **1.8 Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “Kajian Fasilitas Sosial di Pusat Pelayanan Primer Kabupaten Bandung” diantara lain meliputi:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan Sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian, metodologi penelitian termasuk kerangka penelitian serta bagian sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN TEORI**

Bab ini menguraikan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai acuan dalam studi ini yang bermanfaat sebagai bekal informasi untuk melanjutkan proses penelitian pada penelitian ini.

### **BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI**

Gambaran umum wilayah yang digambarkan pada bab ini merupakan batas-batas wilayah yang di jadikan lokasi dalam penelitian tersebut secara lebih khusus, sehingga menjadi sebuah gambaran yang jelas untuk dilanjutkan dalam proses penelitian tersebut.

### **BAB IV ANALISIS FASILITAS SOSIAL**

Dalam bab ini berisikan tentang mengenai analisis kebutuhan fasilitas, tingkat pelayanan, analisis persepsi masyarakat, analisis fasilitas sarana penunjang dan kualitas pelayanan fasilitas sosial yang dinilai dari fasilitas yang disediakan untuk dapat melayani penduduk wilayahnya.

### **BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Kesimpulan dan rekomendasi merupakan hasil dari analisis yang telah dipakai untuk penelitian tersebut serta rekomendasi yang dapat dijadikan saran bagi pihak-pihak yang terlibat.